



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5200.5201, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3846402,3454640  
www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S - 8658 /PB/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Proyeksi Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga  
(K/L) yang Terindikasi Pagu Minus di Akhir TA 2017

4 - 10 - 2017

**Yth. Para Sekretaris/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal  
Kementerian Negara /Lembaga  
(Terlampir)**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap data pagu dan realisasi belanja pegawai Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan 22 September 2017, diproyeksikan/diindikasikan adanya potensi realisasi belanja pegawai yang melebihi pagunya (pagu minus) di akhir tahun anggaran 2017 pada 6.634 Satker K/L. Data proyeksi pagu minus Belanja Pegawai di akhir tahun 2017 dan data pagu minus Belanja Pegawai per 22 September 2017 pada Kementerian/Lembaga Saudara sebagaimana terlampir;
2. Perlu kami sampaikan bahwa Permasalahan pagu minus merupakan permasalahan yang selalu berulang setiap tahun dan menjadi catatan penting Badan Pemeriksa Keuangan yang ikut mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama periode 2012 s/d 2015. Selama periode tersebut, data pagu minus yang tidak terselesaikan adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH SATKER	JUMLAH PAGU MINUS
2012	2.100	Rp950.037.055.740
2013	4.226	Rp4.778.092.610.978
2014	2.769	Rp3.388.673.158.591
2015	3.482	Rp4.950.693.418.943

3. Hilangnya catatan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan permasalahan pagu minus belanja pegawai dalam LKPP Tahun 2016 (Audited) telah berkontribusi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016.
4. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pagu minus khususnya pada Belanja Pegawai di akhir tahun anggaran 2017 dan menjaga kualitas LKPP pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, dimohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan revisi DIPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

5. Adapun data lebih rinci terkait dengan pagu minus belanja pegawai pada Satker K/L yang berpotensi mengalami pagu minus di akhir tahun 2017 pada K/L Saudara dapat menghubungi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan/atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Seluruh Indonesia

Lampiran  
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor : S-8658 /PB/2017  
Tanggal : 4 Oktober 2017

**Kepada Yth :**

1. SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH AGUNG
3. ASISTEN JAKSA AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
4. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI
6. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
7. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
8. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
9. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
10. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
11. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
12. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
13. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
15. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
16. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
17. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
18. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
19. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
20. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
21. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA
22. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
23. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI
24. SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
25. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
26. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27. ASISTEN BIDANG PERENCANAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
28. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
29. SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
30. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
31. SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
32. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
33. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
34. SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
35. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
36. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
37. SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
38. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
39. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
40. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
41. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
42. SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
43. SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL
44. SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI